



Kesejahteraan Guru di Indonesia

Saidun Hutasuhut¹, Irma Siagian², Harrington Silaban^{3*}, Fridayani Sitio⁴, Hanna Hotmian Silalahi⁵, Hotmaria Silva Dewi Naibaho⁶, Putri Helena Lahagu⁷

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
E-mail addresses: harringtonsilaban@mhs.unimed.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 19, 2025

Kata Kunci:

Kesejahteraan Guru; Guru Honorer;
Kualitas Pendidikan

Keywords:

Teacher Welfare; Honorary Teachers;
Educational Quality



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesejahteraan guru di Indonesia, menggunakan metode kualitatif studi pustaka, yang mengungkapkan kondisi kesulitan guru honorer dengan gaji rendah (Rp300.000-Rp1.000.000) dan beban kerja tinggi. Dampaknya terlihat pada penurunan kualitas pendidikan, dengan guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan akibat kesejahteraan yang buruk. Penelitian merekomendasikan strategi komprehensif mencakup penjaminan gaji tetap, perlindungan kesehatan, pelatihan berkelanjutan, dan regulasi yang melindungi hak-hak guru honorer untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

ABSTRACT

This research examines teacher welfare in Indonesia using a qualitative literature study method, revealing the challenging conditions of honorary teachers with low salaries (Rp300,000-Rp1,000,000) and high workloads. The impact is evident in declining educational quality, with teachers forced to seek additional work due to poor welfare. The study recommends comprehensive strategies including guaranteed fixed salaries, health protection, continuous training, and regulations protecting honorary teachers' rights to improve national educational quality.

1. PENDAHULUAN

Guru adalah komponen utama dalam sistem pendidikan yang berperan strategis dalam menciptakan generasi berkualitas. Namun, di Indonesia, kesejahteraan guru masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Kesejahteraan guru mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, dan pengembangan profesional. Kondisi kesejahteraan ini tidak hanya berdampak pada motivasi dan kinerja guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan (Hasanah & Zainuddin, 2024).

Masalah kesejahteraan guru sangat terasa pada kelompok guru honorer, yang sebagian besar menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak. Gaji mereka sering kali berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, angka yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan (Dhobith, 2024). Kesenjangan ini juga diperburuk oleh terbatasnya akses guru honorer terhadap tunjangan seperti yang diterima guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, guru di daerah terpencil menghadapi tantangan lain, seperti akses terhadap pelatihan profesional yang terbatas, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, dan isolasi geografis.

Program sertifikasi guru yang diluncurkan oleh pemerintah sejak 2005 bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi yang tidak merata dan mekanisme penilaian yang belum sepenuhnya transparan (Noviana, 2018). Sertifikasi ini diharapkan tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas guru, tetapi juga menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, data menunjukkan bahwa banyak guru bersertifikat yang belum sepenuhnya merasakan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru yang baik secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang merasa dihargai secara finansial dan sosial lebih termotivasi untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan membangun hubungan positif dengan siswa mereka. Sebuah studi oleh Mai Afinda Sari et al., (2024) mengungkapkan bahwa kesejahteraan finansial guru berpengaruh signifikan terhadap motivasi mengajar dan hasil belajar siswa.

Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Hal ini mencakup peningkatan gaji yang sesuai dengan biaya hidup, pemberian tunjangan berbasis kinerja, serta penyediaan akses pelatihan profesional yang merata, terutama bagi guru di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi guru, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar pada kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan guru yang sejahtera, sistem pendidikan dapat mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dimana, hasil penelitian dijabarkan dengan menggunakan kata-kata dan didukung dengan sumber yang relevan. Adapun referensi dan sumber bacaan terkait dalam tulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kajian literatur. Dimana, penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah setiap sumber yang didapatkan (Snyder, 2019) terkait topik pembahasan yang terkait dengan topik penelitian yang diusung. Adapun sumber-sumber terkait dikumpulkan melalui situs indeksasi terpercaya di Indonesia, yaitu Sinta. Melalui sumber yang sudah dikumpulkan, penulis memperdalam dan mempertajam bahasan sehingga menunjang kebaruan sumber untuk penelitian-penelitian lain yang sejalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Kesejahteraan Guru

Saat ini, kesejahteraan guru masih rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan. Gaji menjadi elemen utama yang menentukan kesejahteraan guru, namun aspek lain seperti kelancaran kenaikan pangkat, kepastian karir, dan hubungan interpersonal juga penting. Secara mendasar, kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, seperti sandang, pangan, dan papan. Dulu, memiliki makanan, pakaian, dan tempat tinggal sederhana sudah

dianggap sejahtera, namun kini standar kesejahteraan telah berubah menjadi lebih kompleks. Semua orang membutuhkan kesejahteraan, termasuk guru yang bekerja keras mendidik tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang anak. Sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa," guru bertugas mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan tanggung jawab moral yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. (Aulia et al., 2023)

Kesejahteraan guru mencakup gaji pokok dan tambahan berupa berbagai tunjangan. Selain itu, guru juga menerima uang dinas, seperti honor untuk rapat, pembuatan soal, koreksi, penyusunan rapor, hingga tugas luar sekolah, seperti MGMP, pelatihan, atau kegiatan dinas lainnya. Besaran gaji pokok guru bergantung pada golongan dan pengelompokan berdasarkan pemberi gaji, yaitu PNS, guru honorer daerah, guru kontrak, dan guru swasta. Guru PNS, misalnya, menerima gaji dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan golongan dan masa kerja, dengan nominal berkisar antara Rp800.000 hingga Rp2.000.000. (Oktafiana, 2023)

Isbandi dalam (Oktafiana, 2023) mengatakan bahwa gaji guru honorer daerah (PHD) dibayarkan oleh pemerintah daerah masing-masing, sedangkan guru kontrak menerima gaji dari pemerintah pusat sebesar Rp 710.000 per bulan. Sementara itu, guru swasta digaji oleh sekolah melalui SPP siswa, dengan tarif per jam yang bervariasi antara Rp 10.000 hingga Rp 20.000, tergantung pada besar-kecilnya sekolah. Guru swasta juga mendapat tunjangan dari pemerintah pusat berupa Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) senilai Rp 1.200.000 per tahun, namun tidak semua guru menerima tunjangan ini, sehingga terkadang dibagi rata. Selain itu, beberapa pemerintah daerah memberikan subsidi bulanan untuk guru swasta, dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 50.000 per guru tergantung daerah. Sayangnya, masih banyak guru swasta, terutama di madrasah, yang hanya menerima gaji dari sekolah sebesar Rp 50.000 hingga Rp 300.000.

Perbedaan lainnya adalah hanya guru negeri yang menerima fasilitas berupa jaminan kesehatan melalui Jamsostek serta dana pensiun setelah masa kerja usai, sementara guru PHD, kontrak, dan swasta tidak memperoleh hal tersebut. Selain itu, terdapat masalah ketimpangan yang signifikan dalam hal gaji, kesejahteraan, dan fasilitas antara guru swasta, kontrak, atau PHD dengan guru PNS. Ketimpangan ini memicu kecemburuan, karena meskipun guru swasta memiliki tanggung jawab serupa, seperti mendidik, mengajar, dan membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka masih kurang memadai.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam laporan 2017-2018 kepada DPR, terdapat empat masalah utama dalam pendidikan di Indonesia: ketimpangan pengembangan kompetensi, kurangnya perlindungan guru dari kekerasan, distribusi guru untuk sertifikasi, dan isu kesejahteraan. Menurut Lokadata (2018/2019), jumlah guru di Indonesia tercatat sebanyak 2,94 juta, dan terus menurun sejak 2014 hingga 2019. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya tuntutan dari pihak sekolah yang tidak seimbang dengan kesejahteraan yang dirasakan guru. Beban tuntutan tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan guru dan meningkatkan tingkat stres mereka. (Dara et al., 2021)

Salah satu bentuk penghormatan kepada guru adalah melalui gaji. Namun, gaji guru di Indonesia, terutama bagi guru swasta dan honorer, masih tergolong rendah.

Sebagai perbandingan, di Jepang, gaji guru rata-rata mencapai Rp 38 juta per bulan, bahkan guru baru menerima sekitar ¥900.000 atau Rp 17 juta per bulan. Jepang memandang guru sebagai elemen penting dalam pembangunan, sehingga mereka memberikan penghargaan berupa gaji yang layak untuk menjamin kesejahteraan guru dan keluarganya. (Mansir, 2020)

Melihat tingginya penghargaan pemerintah Jepang terhadap guru, Indonesia seharusnya meningkatkan gaji guru. Saat ini, perhatian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan guru, terutama honorer, tampak minim. Hal ini terlihat dari kondisi ekonomi guru yang kurang stabil, yang berimbas pada rendahnya minat masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk menjadi guru. Persepsi negatif terhadap profesi guru, terutama jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter atau insinyur, juga turut memengaruhi. Peningkatan kesejahteraan guru penting untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap profesi ini dan meningkatkan kualitas kerja para guru. Pemerintah perlu memberikan prioritas pada hal ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik (Aulia et al., 2023)

Salah satu contoh kasus di lapangan dalam (Mansir, 2020) adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah di Bengkulu yang mengeluhkan gajinya hanya sebesar Rp300.000, meskipun beban kerja dan tanggung jawabnya setara dengan guru PNS. Setelah mengajar, ia masih harus bekerja di sawah dan kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan dari profesinya sebagai guru tidak mencukupi. Kondisi ini sangat kontras dengan di Malaysia, di mana gaji pokok guru bisa mencapai RM 6.982 atau sekitar Rp22,46 juta per bulan, sementara di Indonesia, bahkan guru bersertifikasi hanya mendapatkan sekitar Rp7 juta. Situasi ini mencerminkan betapa kesejahteraan guru, yang seharusnya menjadi pejuang pendidikan bangsa, masih jauh dari layak.

Pemerintah seharusnya menetapkan gaji guru yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara guru di desa dan di kota. Guru di pedesaan sering kali menghadapi tantangan yang lebih berat, seperti fasilitas pendidikan yang minim, gedung sekolah yang kurang terawat, serta akses jalan yang sulit. Sebaliknya, guru di kota lebih dimudahkan dengan fasilitas yang lengkap dan siswa yang cenderung lebih siap, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman.

Namun, gaji yang rendah dan kurangnya perhatian pemerintah membuat banyak guru profesional enggan mengajar di pedesaan. Akibatnya, tugas tersebut sering kali jatuh kepada guru yang kurang berpengalaman, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang tidak maksimal. Ketimpangan ini pun terus berlanjut dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kesejahteraan, agar masalah ini dapat segera diatasi. (Mansir, 2020).

b. Dampak Kesejahteraan Guru terhadap Kinerja

Kinerja guru yang optimal berperan penting dalam menghasilkan peserta didik berkualitas serta mewujudkan tujuan pendidikan. Namun, tidak semua guru mengembangkan diri melalui pelatihan. Meskipun gaji sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan, sebenarnya, kesejahteraan guru lebih luas dari sekadar gaji.

Faktor-faktor kesejahteraan meliputi: 1) fasilitas yang memadai, 2) gaji yang memenuhi standar hidup, 3) lingkungan kerja yang aman dan nyaman, 4) sistem kerja yang adil dan terbuka, serta 5) ruang untuk kreativitas dan aspirasi. Faktor-faktor ini akan meningkatkan etos dan moral kerja guru, yang pada gilirannya mendongkrak kinerja profesional mereka. (Massalim, 2019)

Kesejahteraan berdampak pada motivasi dan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti motivasi, keahlian, pengalaman profesional, dan latar belakang pendidikan memengaruhi kinerja guru di sekolah. Meski kesejahteraan meningkat, motivasi dan kinerja mengajar tetap rendah, sehingga menghambat proses pembelajaran siswa. Hal ini terjadi karena metode pengajaran tidak sesuai dengan kemampuan guru, kurangnya pemahaman teknologi, metode efektif, dan minimnya keterlibatan sekolah dalam pengembangan kemampuan guru. Akibatnya, kebutuhan siswa akan pendidikan tidak terpenuhi secara optimal. Runtini dalam mengungkapkan bahwa beberapa penelitian, termasuk hasil PISA 2012, menunjukkan penurunan kualitas siswa Indonesia, meskipun hal ini tidak sepenuhnya terkait dengan lemahnya upaya guru dalam meningkatkan keterampilannya (Mai Afinda Sari et al., 2024)

Kesejahteraan yang memadai bagi guru sangat penting untuk mendukung kebutuhan finansial mereka. Dengan begitu, guru dapat lebih fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya, tanpa terdoda untuk mencari pekerjaan sampingan. Guru dengan kesejahteraan yang tinggi akan meningkatkan kinerja mereka, yang pada gilirannya berdampak positif pada proses pembelajaran dan keberhasilan peserta didik. Analisis data yang telah dipaparkan dalam (Ardhi, 2022) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kesejahteraan guru terhadap kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Pringgarata, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar 3,543, yang berarti H_1 diterima. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan guru sangat penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan kinerjanya dalam mengajar tanpa khawatir mencari penghasilan tambahan.

Kesejahteraan guru berdampak pada kinerja mereka di MTs Nahdlatuth Thullaab, Kecamatan Licin. Untuk itu, kualitas kesejahteraan guru perlu dipenuhi, seperti fasilitas rumah, tunjangan kinerja, layanan kesehatan, makan, tunjangan transportasi, serta pelatihan dan pengembangan diri, yang semuanya harus tercantum dalam kebijakan pemerintah. (Moh. As'adi & Slamet, 2022)

c. Tantangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru

1. Gaji guru

Kesejahteraan guru ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan material dan sosial, yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan layak dan mengembangkan diri dalam melaksanakan tugas sosialnya sebagai pengajar. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga pendidik. Hak dan kewajiban tersebut berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat kinerja guru, agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan atau tugas di lingkungan organisasi pemerintah. Pemenuhan hak dan kewajiban guru adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, seiring dengan perjuangan dan

tanggung jawab yang mereka pikul. Hak merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap guru, yang harus dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. (Kulsum, 2023).

Kesejahteraan guru yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pendapatan yang tidak mencukupi, banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Beberapa di antaranya mengajar di sekolah lain, memberikan les privat, bekerja sebagai tukang ojek, berjualan mie rebus, menjual buku atau LKS, menjual pulsa ponsel, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya. Selain itu, ketimpangan kesejahteraan antara guru swasta dan guru negeri juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Di lingkungan pendidikan swasta, mencapai tingkat kesejahteraan yang ideal masih menjadi tantangan besar (kusnadi, 2017).

2. Beban kerja tinggi

Guru di era digital menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kompetensi mereka agar mampu bersaing dengan standar kebutuhan pengembangan pendidikan. Saat ini, guru dituntut untuk merencanakan dan mengelola perubahan dalam pembelajaran. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi mereka sebagai pengajar dan pendidik. Selain itu, guru harus siap menghadapi beberapa isu penting dalam dunia pendidikan, seperti kompetisi, transparansi, efisiensi, dan kualitas tinggi. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama bagi guru untuk memastikan kelangsungan profesi mereka. Selain meningkatkan kualitas pengajaran, guru juga diharapkan dapat mengembangkan tiga aspek intelegensi dasar siswa, yaitu intelektual, emosional, dan moral, serta dimensi spiritual siswa (Sugiarti, 2019). Tugas utama seorang guru adalah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Namun, seringkali fokus pada tugas tersebut teralihkan oleh kewajiban lain, seperti pekerjaan administrasi atau tanggung jawab tambahan seperti menjadi wali kelas, pembina ekstrakurikuler, atau panitia untuk berbagai kegiatan sekolah. Tugas-tugas ini menambah beban kerja guru, yang sering kali membuat mereka merasa terbebani. Banyak guru mengeluhkan beban kerja yang berat, karena selain mengajar, mereka juga harus menangani berbagai urusan administrasi (Chyquitita, 2024).

3. Kurangnya fasilitas

Di beberapa sekolah yang berada di daerah terpencil, fasilitas dan infrastruktur yang ada masih belum memadai. Akibatnya, alat dan perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan IPTEK di proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang melibatkan teknologi, keberadaan jaringan internet sangat penting agar guru dan siswa dapat mengakses informasi secara lebih luas dan mudah. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, sehingga penerapan pembelajaran berbasis IPTEK tidak dapat berjalan secara maksimal (mutia, wosal, & monigir, 2023).

d. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru

Penghargaan terhadap profesi guru sering kali berujung pada adanya otoritarianisme yang mempengaruhi guru, sehingga potensi siswa tidak dapat berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, beberapa langkah kebijakan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru antara lain (Kulsum, 2023):

1. Menjamin gaji tetap, perlindungan kesehatan, dan perhatian sosial bagi guru.

2. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada guru honorer untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.
3. Menyediakan bantuan hukum serta kontrak kerja untuk melindungi profesi guru honorer.
4. Mengembangkan kebijakan atau regulasi pemerintah yang mengatur standar penerimaan guru honorer di setiap jenjang pendidikan, berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, keahlian, kompetensi, dan profesionalisme.
5. Pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan perlu meningkatkan status serta kesejahteraan guru honorer dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
6. Adanya regulasi hukum yang mengatur profesi guru honorer;
7. Baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program sekolah gratis tetap memberikan tunjangan intensif yang dibiayai melalui APBN dan APBD;
8. Pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian untuk memasukkan guru honorer ke dalam database;
9. Menyediakan informasi secara transparan di media massa dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru honorer untuk mengikuti sertifikasi, serta mengevaluasi kembali persyaratan dan kriteria sertifikasi yang menjadi hambatan bagi mereka;
10. Pemerintah perlu mendirikan lembaga pemantau pendidikan independen yang melibatkan organisasi profesi guru dan ahli pendidikan;
11. Tersedianya anggaran atau bantuan untuk pengembangan organisasi guru honorer yang bertujuan memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai melalui APBN dan APBD;
12. Adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan untuk kesejahteraan profesi guru honorer.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesejahteraan guru di Indonesia, terutama guru honorer, masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, ditandai oleh rendahnya pendapatan, ketimpangan fasilitas, dan beban kerja yang berat, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru, diperlukan langkah strategis seperti penetapan gaji layak, pemberian tunjangan berbasis kinerja, akses pelatihan yang merata, serta perlindungan sosial melalui kebijakan yang jelas dan transparan. Pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan perlu bersinergi dalam menciptakan regulasi dan program yang tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material, tetapi juga pengembangan profesional yang berkelanjutan. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ardhi, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. *Jurnal*

- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin, 1(2), 123-131.
<https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pgmi>
- Aulia, N. R., Shodiqoh, E. L., & Sania Putri Cahyaningrum. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN. *BASA Journal of Language & Literature*, 3(1), 26-31. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>
- Ayudahlya, R., & Kusumaningrum, F. A. (2019). Kebersyukuran dan Kesejahteraan Subjektif pada Guru Sekolah Luar Biasa. *PSIKOLOGIKA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 24(1), 13-26. <https://doi.org/10.20885/psikologi.vol24.iss1.art2>
- Chyquitita, T. (2024). Meningkatkan kualitas pengajaran: Menyikapi tantangan profesionalisme guru di masa kini. 3(3), 1-9.
- Dara, Y. P., Aisyah, S., Faizah, F., & Rahma, U. (2021). Kesejahteraan guru: Apakah tuntutan emosional kerja dan kepercayaan pada rekan kerja itu penting? *Jurnal Ecopsy*, 8(2), 109. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.2021.06.010>
- Dhobith, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN GAJI GURU HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GURU HONORER DI INDONESIA. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 7(1), 44-62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.6609>
- Hasanah, S. N., & Zainuddin, A. (2024). Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru SD Muhammadiyah PK Kottabarat dan SD Muhammadiyah 10 Tipe. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 902-908. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.992>
- Kulsum, U. (2023). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap. *Journal on Education*, 06(01), 8894-8912. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4374%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4374/3569>
- Mai Afinda Sari, L., Avrilia Devianti, L., & Firanda Putri, M. (2024). DAMPAK KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA MENGAJAR DI SMA 11 SURABAYA. *JIP*, 2(4), 683-692.
- Mai Afinda Sari, L., Avrilia Devianti, L., Firanda Putri, M., Trihantoyo, S., & Nuphanudin. (2024). DAMPAK KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA MENGAJAR DI SMA 11 SURABAYA. *JIP*, 2(4), 683-692.
- Mansir, F. (2020). KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS GURU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN NASIONAL ERA DIGITAL. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) Unars*, 8(2), 293-303. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsdunars/index>
- Massalim, S. Z. (2019). Pengaruh kesejahteraan guru terhadap kinerja guru PAUD di Kp.Cibadak Kayumanis Bogor. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 13(2), 62. <https://doi.org/10.32832/jpls.v13i2.2650>
- Moh. As'adi, & Slamet. (2022). PENGARUH KESEJAHTERAAN GURU DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU PADA MTS NAHDLATUTH THULLAAB KECAMATAN LICIN. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 374-380. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.71>

- Nabila Rahma Aulia, Embun Luthfi Shodiqoh, & Sania Putri Cahyaningrum. (2023). Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *BASA Journal of Language & Literature*, 3(1), 26-31. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>
- Noviana, N. E. (2018). DAMPAK KESEJAHTERAAN GURU HONORER BAGI MUTU GURU DALAM PENDIDIKAN. *JURNAL WIDYALOKA IKIP WIDYA DARMA*, 5(1), 82-93.
- Oktafiana, R. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN. *BASA Journal of Language & Literature*, 3(1), 26-31. <https://www.researchgate.net/publication/307685325>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tagela, U., Sanoto, H., & Paseleng, M. C. (2023). Korelasi Pengalaman Kerja, Kesejahteraan Dengan Motivasi Kerja Guru-Guru SMA Swasta. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2, 188-194. <https://doi.org/10.24246/j.js.2023.v13.i2.p188-194>